

**ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF LOCAL TAXES, REGIONAL
RETRIBUTIONS, AND INVESTMENTS ON REGIONAL GROSS DOMESTIC
PRODUCT WITH CAPITAL EXPENDITURE AS A MODERATOR**

**ANALISIS PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DAN
INVESTASI TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI PEMODERASI**

Della Siti Aisah¹, Andy Dwi Bayu Bawono^{2*}

Universitas Muhammdiyah Surakarta^{1,2}

B200200494@student.ums.ac.id¹, andy.bawono@ums.ac.id^{2*}

ABSTRACT

This research aims to test the significant influence of regional taxes, regional levies and investment on gross regional domestic product with capital expenditure as a moderator. Using purposive sampling technique with a total sample of 191 districts/cities in Java. This research uses secondary data from the realization of the income budget. The analytical method used in the research is moderated regression analysis. The results of this research show that the Regional Tax and Regional Levy variables have a significant positive effect on Gross Regional Domestic Product, while the Investment variable has no significant effect on Gross Regional Domestic Product. Apart from that, the Capital Expenditure variable can moderate the Regional Tax and Regional Levy variables on Gross Regional Domestic Product so that it acts as a pure moderator, but the Capital Expenditure variable cannot moderate the Investment variable on Gross Regional Domestic Product because here it acts as a moderator homologizer.

Keywords: Regional Tax, Regional Levy, Investment, Gross Regional Domestic Product, Capital Expenditure

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh signifikan pajak daerah, retribusi daerah, dan investasi terhadap produk domestik regional bruto dengan belanja modal sebagai pemoderasi. Menggunakan teknik *purposive sampling* dengan jumlah sampel 191 kabupaten/kota di Jawa. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari realisasi anggaran pendapatan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian adalah *moderated regression analysis*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto sedangkan variabel Investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Produk domestik Regional Bruto. Selain itu, variabel Belanja Modal dapat memoderasi variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto sehingga berperan sebagai *pure moderator*, namun variabel Belanja Modal tidak dapat memoderasi variabel Investasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto karena disini berperan sebagai *homologiser moderator*.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Investasi, Produk Domestik Regional Bruto, Belanja Modal

PENDAHULUAN

Dalam Undang-undang No. 23 tahun 2014, pengertian Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan pada UU no 23 tahun 2014 pun banyak menjabarkan fungsi dari otonomi daerah di antaranya meningkatkan pelayanan

masyarakat, mengembangkan kehidupan berdemokrasi, mendorong pemberdayaan masyarakat hingga menumbuhkan kreativitas masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses dimana terdapat peningkatan kemampuan dari perekonomian suatu negara dalam memproduksi output yaitu barang dan jasa yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang penting dalam melakukan analisis tentang

pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara atau suatu daerah dalam periode waktu tertentu sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat (Kresnandra et al., 2013).

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah biasanya ditunjukkan dengan meningkatkan produksi barang dan jasa yang diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau sektor-sektor ekonomi dalam suatu wilayah dan periode waktu tertentu (Suryatiningrum et al., 2020). Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah itu sama dengan pertumbuhan PDRB di wilayah tersebut (BPS, 2011). PDRB yang dijadikan sebagai tolak ukur pertumbuhan ekonomi di dalam sistem pemerintahan desentralisasi ternyata belum mampu dihasilkan dengan baik oleh daerah-daerah di Indonesia meskipun sistem pemerintahan desentralisasi sudah berjalan cukup lama (Feriyanto, 2014).

Dari berbagai sumber dari daerah, pajak dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan terbesar dibandingkan dengan sumber lainnya. Pajak dan retribusi daerah berperan penting dalam perekonomian daerah, serta dianggap sebagai modal untuk melaksanakan pembangunan daerah (Susetyo et al., 2019). Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah. Artinya penerimaan pajak daerah digunakan pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana sektor publik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam menunjang kegiatan ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Rini et al., 2018).

Pada perekonomian daerah penyisihan investasi akan menciptakan fluktuasi pada perekonomian suatu daerah karena dengan adanya investasi akan

mempengaruhi meningkatnya kesempatan kerja dan juga produksi barang dan jasa (Yahya et al., 2022). Dari sisi pengeluaran, pendapatan regional bruto adalah penjumlahan dari berbagai variabel termasuk di dalamnya adalah investasi. Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran (Fatmawati, 2022). Penanaman modal atau investasi di daerah memegang dua macam fungsi yaitu untuk menciptakan permintaan barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat dan untuk menambah kapasitas produksi dari daerah yang bersangkutan. Investasi pemerintah dilakukan guna menyediakan barang publik (Zulaili et al., 2020).

Di sisi lain pemerintah pusat memberikan dana alokasi umum yang digunakan untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah dan membiayai otonomi daerah (Mokoginta et al., 2023). Selain dana tersebut, pemerintah pusat juga mengalokasikan dana bagi hasil dari pajak dan kekayaan daerah guna membantu pendapatannya. Pemerintah daerah menggunakan dana alokasi umum dan dana bagi hasil untuk memenuhi kebutuhan belanja modal (Kusuma & Wahyudi, 2022).

Belanja Modal adalah pengeluaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi belanja modal untuk perolehan Tanah, Gedung, dan Bangunan, Peralatan, dan Aset tak Berwujud. (PP No. 71 Tahun 2010). Belanja Modal sangat berkaitan dengan perencanaan keuangan jangka panjang, terutama pembiayaan untuk pemeliharaan aset tetap yang dihasilkan dari Belanja Modal tersebut (Hidayat & Santosa, 2020).

Belanja modal dapat digunakan untuk mendapatkan aset yang bersifat tetap seperti infrastruktur, bangunan dan aset lainnya tanpa memiliki niat untuk dijual (Maria, 2023). Selain itu, belanja modal dapat digunakan dalam pembangunan daerah yang pada akhirnya berdampak kepada perekonomian (Indra Tama, 2016). Hal tersebut sesuai dengan teori Harrod Domar untuk mencapai kondisi perekonomian yang stabil maka perlu adanya pembentukan modal (Mutiara, 2015). Belanja modal yang bijak dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan peluang pekerjaan, meningkatkan daya saing wilayah, dan menarik investasi (Aghniya, 2016). Pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari belanja modal dapat berdampak positif pada PDRB karena meningkatkan produksi dan pendapatan (Hakim et al., 2019).

Penelitian mengenai Produk Domestik Regional Bruto sudah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya (Iskandar Yahya Arulampalam Kunaraj P. Chelvanathan, 2023). Ditemukan bahwa Pajak Daerah berpengaruh terhadap PDRB seperti yang dijabarkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Hani Puspitasari, Mohammad Khusaini, dan Farah Wulandari Pangestuty (2023), serta berpengaruh positif pada penelitian yang dilakukan Dwika Julia Mutiara (2015). Sedangkan dalam penelitian Sulistia S (2022), menyatakan bahwa Pajak Daerah tidak berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto.

Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto pada penelitian yang dilakukan oleh Dwika Julia Mutiara (2015). Sedangkan dalam penelitian Hani Puspitasari, Mohammad Khusaini, dan Farah Wulandari Pangestuty (2023), menunjukkan bahwa Retribusi Daerah

tidak mempunyai pengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto, serta tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap Produk Domestik Regional Bruto pada penelitian Jaeni & Anggana L, (2016).

Investasi juga merupakan faktor yang berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto, dimana dijelaskan dalam penelitian Septian Gilang Kusuma (2021), bahwa Investasi berpengaruh positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto. Sedangkan pada penelitian Zulaili, Indra Maipita, dan Muhammad Fitri Rahmadana (2020), Investasi tidak berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto. Berdasarkan ketidakkonsistenan dalam penelitian tersebut maka penelitian ini akan menguji kembali variabel tersebut dengan menambah variabel baru yaitu variabel Belanja Modal sebagai pemoderasi guna memperkuat variabel-variabel tersebut. Pada penelitian Darma, (2020), menunjukkan bahwa Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto dan pada penelitian Wijaya et al., (2023) juga menyatakan hal yang sama yaitu Belanja Modal berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto, serta berpengaruh positif pada penelitian yang dilakukan oleh Zuhroh, (2018).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DAN INVESTASI TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI PEMODERASI (Studi Empiris di Kab/Kota se-Jawa Tahun 2018-2020)”

Teori Anggaran

Anggaran dalam lingkup sektor publik menurut Mardiasmo (2002:61), anggaran adalah sebuah proses dalam pengalokasian sumber daya yang dimilikinya pada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas. Selain itu, anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Anggaran merupakan penyampaian dari hasil perumusan strategi dan perencanaan strategi yang telah direncanakan. Menurut Mardiasmo (2002:62), anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan datang. Setiap anggaran memberikan informasi mengenai apa yang akan dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang (Nugraha & Dwirandra, 2016).

Pengaruh Pajak Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto

Menurut Mardiasmo (2010) pajak daerah memiliki ciri-ciri antara lain pajak dipungut oleh negara, pembayaran pajak masuk ke dalam kas negara, pembayar tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung. Menurut Mulyono (2011) dan Mahpudin et al (2020) pajak daerah juga memiliki beberapa fungsi antara lain pajak berfungsi untuk menghimpun kas guna membiayai belanja rutin, pajak berfungsi sebagai pengatur, alat stabilitas dan pajak juga berfungsi untuk redistribusi pendapatan.

Menurut Puspitasari, (2023) pajak daerah termasuk kedalam faktor produksi khususnya pada akumulasi modal. Jika penerimaan pajak daerah meningkat maka akan meningkatkan output berupa barang dan jasa yang dihasilkan PDRB dikarenakan pajak daerah tersebut merupakan modal untuk melakukan kegiatan produksi yang

nantinya akan meningkatkan modal untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan umum, pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian Hidayati, (2016) dimana Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB.

H1 : Pajak Daerah berpengaruh terhadap PDRB

Pengaruh Retribusi Daerah dengan Produk Domestik Regional Bruto

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sebagai sumber pendapatan daerah, retribusi berfungsi untuk membiayai kebutuhan pemerintahan daerah dan untuk pembangunan daerah. Agar tercapainya stabilitas ekonomi daerah, retribusi daerah juga berfungsi untuk membuka lapangan pekerjaan baru guna mengurangi jumlah pengangguran. Retribusi daerah dan PDRB memiliki hubungan yang erat dalam konteks ekonomi suatu wilayah. Retribusi daerah adalah pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari pungutan atas pelayanan atau fasilitas yang diberikan kepada masyarakat atau perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian Dwika Julia Mutiara (2015) dimana Retribusi Daerah berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan yang positif secara statistik terhadap PDRB.

H2 : Retribusi Daerah berpengaruh terhadap PDRB

Pengaruh Investasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto

Investasi adalah faktor pendukung penting dalam pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dalam memperluas

kesempatan kerja, meningkatkan output produksi, mensejahterahkan masyarakat, dan juga investasi sendiri dapat meningkatkan tabungan pada masa yang akan datang. Investasi adalah penempatan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut Sukirno (2010). Definisi lain mengenai investasi di kemukakan oleh Sunariyah (2011) “Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan diinvestasikan adalah penempatan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut (Abdul Halim, 2015). Hal ini sejalan dengan penelitian Novita Panelewen, Josep Bintang Kalangi, dan Een N. Walewengko (2020) dimana secara parsial investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB.

H3 : Investasi berpengaruh terhadap PDRB

Pengaruh Pajak Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto dengan Belanja Modal sebagai pemoderasi

Pajak daerah, termasuk pajak properti, pajak penjualan, dan pajak lainnya, menjadi salah satu sumber pendanaan utama untuk belanja modal. Pemerintah daerah dapat menggunakan pendapatan pajak ini untuk mendukung proyek-proyek investasi yang dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing wilayah. Hal ini sejalan dengan penelitian Asya Aghniya, Ayu Ningrum, Chumaedi Afriansyah, Faiqotul Ikrimah, Ibnu Ubaidillah, Amin, Ines wulantika, dan Misrohimi (2023) dimana Belanja modal memediasi hubungan antara PAD dan PDRB Harga Berlaku.

H4 : Pajak Daerah berpengaruh terhadap PDRB dengan Belanja Modal sebagai pemoderasi

Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto dengan Belanja Modal sebagai pemoderasi

Retribusi daerah adalah pendapatan pemerintah daerah dari pungutan atas layanan atau fasilitas kepada masyarakat atau perusahaan, menjadi sumber utama pendanaan belanja modal. Pengelolaannya yang bijak dan transparan dapat mendukung pembangunan wilayah, meningkatkan daya saing ekonomi, dan kontribusi terhadap PDRB. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB. Hal ini sejalan dengan penelitian Humaidi Hakim, M. Faisal Abdullah, Arfida Boedirochminarni (2019) dimana variabel belanja modal pengeluaran positif signifikan terhadap PDRB.

H5 : Retribusi Daerah berpengaruh terhadap PDRB dengan Belanja Modal sebagai pemoderasi

Pengaruh Investasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto dengan Belanja Modal sebagai variable moderasi

Investasi yang diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi dapat merangsang ekonomi suatu wilayah. Ini dapat menciptakan lingkungan yang mendukung kegiatan ekonomi, mendorong investasi swasta, dan pada gilirannya, meningkatkan PDRB. Investasi yang bijak dan terarah dapat menjadi katalisator penting untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan PDRB suatu wilayah. Belanja modal mencakup pengeluaran pemerintah untuk investasi jangka panjang dalam

infrastruktur, proyek-proyek pembangunan, dan aset produktif lainnya. Hal ini sejalan dengan penelitian Didik Susetyo, Zunaidah, Anna Yulianita dan Wulan Lestari (2019) dimana Investasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap PDRB.

H6 : Investasi berpengaruh terhadap PDRB dengan Belanja Modal sebagai pemoderasi

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan uji hipotesis. Populasi penelitiannya adalah kabupaten/kota di Jawa, yang berjumlah 119, terdiri dari 85 kabupaten dan 34 kota. Penelitian ini menggunakan teknik sampling purposive, yang dipilih berdasarkan kriteria seperti lokasi di Pulau Jawa, publikasi informasi keuangan, data belanja modal, data investasi, dan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2018-2020.

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain dan tidak langsung didapatkan oleh peneliti dari subjek penelitiannya (Wiyono, 2012:131). Pada umumnya, data sekunder berupa bukti, laporan atau catatan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan. Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini berasal dari sumber-sumber sebagai berikut: data-data tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Investasi, Produk Domestik Regional Bruto, dan Belanja Modal Tahun 2018-2020.

Uji *Moderrated Refresion Analysis* adalah sebuah aplikasi khusus regresi linier berganda yang mengandung unsur interaksi dalam persamaan regresinya. Biasanya unsur interaksi tersebut berisi perkalian anatar dua atau lebih variabel independen. Uji ini digunakan untuk

melihat pengaruh/interaksi variabel dependen yang dalam penelitian ini adalah Produk Domestik Regional Bruto dapat mempengaruhi variabel independennya yaitu Pajak Daerah (PD), Retribusi Daerah (RD), dan Investasi (I) dengan Belanja Modal (BM) sebagai variabel moderasi. Sehingga dapat dirumuskan seperti berikut:

$$PDRB = \alpha + \beta_1PD + \beta_2RD + \beta_3I + e \quad (1)$$

$$PDRB = \alpha + \beta_1PD + \beta_2RD + \beta_3I + \beta_4PD*BM + \beta_5RD*BM + \beta_6I*BM + e \quad (2)$$

Keterangan :

PDRB : Produk Domestik Regional Bruto

PD : Pajak Daerah

RD : Retribusi Daerah I : Investasi

BM : Belanja Modal

a : Konstanta Regresi

E : Eror Term

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Hasil Perolehan Data

Hasil pemilihan sampel berdasarkan kriteria yang ditentukan sebagai berikut: Analisis statistik deskriptif disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Data Sampling

Kriteria	Jumlah
Kabupaten/kota yang bedara di Pulau Jawa	199
Kabupaten/kota yang tidak mempublikasikan informasi keuangan pada Laporan Realisasi APBD tahun Anggaran 2018-2020 secara lengkap.	(0)
Kabupaten/kota yang tidak memiliki data Produk Domestik Regional Bruto 2018-2020	(0)
Kabupaten/kota yang tidak memiliki data Investasi 2018-2020	(32)
Sampel yang memenuhi kriteria selama satu tahun	78
Sampel yang memenuhi kriteria selama tiga tahun	234
Outlier	43
Total sampel N	191

Sumber: Hasil Analisis Data, 2024

Tabel 3. Hasil Analisis Deskriptif

Var	N	Min	Max	Mean	Std.Dev
PD	191	11.990.000.000	1.331.810.000.000	152.162.094.240	177.548.046.119,506
RD	191	3.490.000.000	170.790.000.000	23.063.507.853	15.429.287.419,119
I	191	20.373.182.870	1.111.011.394.452	177.017.463.620	170.817.935.401,578
PDR B	191	4.718.000.000	131.266.362.000.000	21.815.271.816,7	15.146.443.956,4
BM	191	57.420.000.000	1.228.450.000.000	359.292.972.195	181.295.561.145,085
Valid N	191				

Pajak Daerah (PD) memiliki nilai minimum sebesar Rp11.990.000.000 yang dimiliki oleh Kota Banjar tahun 2018. Nilai maksimum sebesar Rp1.331.810.000.000 yang dimiliki oleh Kota Semarang tahun 2018. Nilai standard deviasinya adalah sebesar 177.548.046.119,506 menunjukkan nilai sebaran dari setiap sampel. Selain itu, nilai rata-rata Pajak Daerah sebesar 152.162.094.240,84 secara keseluruhan bernilai positif.

Retribusi Daerah (RD) memiliki nilai minimum sebesar Rp3.490.000.000 yang dimiliki oleh Kota Banjar tahun 2020. Nilai maksimum sebesar Rp107.790.000.000 yang dimiliki oleh Kota Semarang tahun 2018. Nilai standard deviasinya adalah sebesar 15.429.287.419,119 menunjukkan nilai sebaran dari setiap sampel. Selain itu, nilai rata-rata Retribusi Daerah sebesar 23.063.507.853,40 secara keseluruhan bernilai positif.

Investasi (I) memiliki nilai minimum sebesar Rp20.347.182.870 yang dimiliki oleh Kota Probolinggo tahun 2018. Nilai maksimum sebesar Rp1.110.011.394.452 yang dimiliki oleh Kab. Purworejo tahun 2020. Nilai standard deviasinya adalah sebesar 170.817.935.401,578 menunjukkan nilai sebaran dari setiap sampel. Selain itu, nilai rata-rata Investasi sebesar 177.017.463.620,58 secara keseluruhan bernilai positif.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki nilai minimum sebesar Rp4.718.000.000.000 yang dimiliki oleh Kota Mojokerto tahun 2018. Nilai maksimum sebesar Rp131.266.362.000.000 yang dimiliki oleh Kota Semarang tahun 2018. Nilai standard deviasinya adalah sebesar 15.146.443.956.745,420 menunjukkan nilai sebaran dari setiap sampel. Selain itu, nilai rata-rata Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 21.815.271.816.753,93 secara keseluruhan bernilai positif.

Belanja Modal (BM) memiliki nilai minimum sebesar Rp57.420.000.000 yang dimiliki oleh Kota Banjar tahun 2020. Nilai maksimum sebesar Rp1.228.450.000.000 yang dimiliki oleh Kota Semarang tahun 2018. Nilai standard deviasinya adalah sebesar 181.295.561.145,085 menunjukkan nilai sebaran dari setiap sampel. Selain itu, nilai rata-rata Belanja Modal (BM) sebesar 359.292.972.195,17 secara keseluruhan bernilai positif.

Uji Asumsi Klasik

Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS 26 menghasilkan data sebagaimana terlihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas Persamaan 1

One-Sample Kolmogorov Smirnov Test	
Unstandardized Residual	
N	191
Test Statistic	.097
Asymp.Sig(2-tailed)	.000 ^c

Sumber: Hasil Analisis Data, 2024

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas Persamaan 2

One-Sample Kolmogorov Smirnov Test	
Unstandardized Residual	

N	191
Test Statistic	.080
Asymp.Sig(2-tailed)	.004 ^c

Sumber: Hasil Analisis Data, 2024

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test untuk mengetahui apakah variabel pengganggu (residual) memiliki distribusi normal (Ghozali, 2018:161). Berdasarkan uji normalitas seperti yang terlihat di dalam Tabel IV. 2 hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig (2-tailed) persamaan satu sebesar 0,000 yang lebih kecil dari level of signifikan 5 persen (0,05). Sedangkan seperti yang terlihat di dalam Tabel IV. 3 hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig (2-tailed) persamaan dua sebesar 0,004 dan hasilnya lebih kecil dari level of signifikan 5 persen (0,05). Namun, kedua persamaan tersebut dapat menggunakan uji CLT (Central Limit Theorem) yaitu jika jumlah data yang diobservasi cukup besar (n lebih dari 30), maka hasil data semakin mendekati normal (Gujarati, 2006) dan penelitian ini jumlah n sebesar 19 lebih dari 30. Berdasarkan pengujian diatas menunjukkan bahwa persamaan 1 dan persamaan 2 menggunakan CLT hasilnya dapat dikatakan data residual ini berdistribusi normal.

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinieritas Persamaan 1

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Pajak Daerah	0,444	2,25	Tidak Terjadi Multikolinieritas
Retribusi Daerah	0,475	2,10	Tidak Terjadi Multikolinieritas
Investasi	0,753	1,32	Tidak Terjadi Multikolinieritas

Sumber : Hasil Analisis Data, 2024

Tabel 7. Hasil Uji Multikolinieritas Persamaan 2

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Pajak Daerah * Belanja Modal	0,145	6,896	Tidak Terjadi Multikolinieritas
Retribusi Daerah * Belanja Modal	0,895	1,105	Tidak Terjadi Multikolinieritas
Investasi * Belanja Modal	0,795	1,259	Tidak Terjadi Multikolinieritas

Pajak Daerah	0,399	2,20	Tidak Terjadi Multikolinieritas
Retribusi Daerah	0,472	2,12	Tidak Terjadi Multikolinieritas
Investasi	0,753	1,32	Tidak Terjadi Multikolinieritas
Belanja Modal	0,746	1,34	Tidak Terjadi Multikolinieritas

Sumber : Hasil Analisis Data, 2024

Berdasarkan hasil pengujian di atas menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki tolerance lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari multikolinieritas.

Tabel 8. Hasil Uji Heteroskedastisitas Persamaan 1

Variabel	Sig(2-tailed)	Keterangan
Pajak Daerah	0,410	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Retribusi Daerah	0,191	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Investasi	0,846	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Sumber : Hasil Analisis Data, 2024

Tabel 9. Hasil Uji Heteroskedastisitas Persamaan 2

Variabel	Sig(2-tailed)	Keterangan
Pajak Daerah	0,122	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Retribusi Daerah	0,850	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Investasi	0,721	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Belanja Modal	0,870	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Pajak Daerah * Belanja Modal	0,145	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Retribusi Daerah * Belanja Modal	0,895	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Investasi * Belanja Modal	0,795	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Sumber: Hasil Analisis Data, 2024

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada tabel di atas menggunakan alat pengujian spearmans rho dan menunjukkan bahwa semua variabel tidak terdapat masalah heteroskedastitas. Karena, dapat dilihat nilai signifikansi atau sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05.

Tabel 10. Uji Autokorelasi Persamaan 1

Durbin-Watson	Simpulan
1,833	Tidak Terjadi Autokorelasi

Sumber: Hasil Analisis Data, 2024

Tabel 11. Uji Autokorelasi Persamaan 2

Durbin-Watson	Simpulan
1,802	Tidak Terjadi Autokorelasi

Sumber: Hasil Analisis Data, 2024

Apabila nilai DW di bawah -2, maka ada autokorelasi positif, sedangkan nilai DW di atas 2 dikatakan autokorelasi negatif. Apabila nilai DW terletak antara -2 sampai 2, maka tidak ada autokorelasi (Santoso: 2012). Dari tabel hasil pengujian di atas, diperoleh nilai DW (durbin watson) pada persamaan 1 senilai 1,833 dan pada persamaan 2 senilai 1,802. sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

Uji Hipotesis

Analisis data Uji Linier Berganda yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS 26 menghasilkan data sebagaimana terlihat pada Tabel 11.

Tabel 12. Hasil Uji Regresi Linier Persamaan 1

Model	Coeff.	t	Sig
(Constant)	9,740E+12	7,397	,000
Pajak Daerah	54,775	9,379	,000
Retribusi Daerah	228,446	3,515	,001
Investasi	-8,631	-0,097	,006

Sumber: Hasil Analisis Data, 2024

$$PDRB = 9,740E+12 + 54,775PD + 228,446RD + -8,631I + e$$

Berdasarkan tabel 12 di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

Nilai *Constant* sebesar 9,740E+12 dengan arah positif. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Investasi, dan Belanja Modal sebagai pemoderasi

bernilai konstan, maka Produk Domestik Regional Bruto akan mengalami kenaikan sebesar 9,740E+12.

Nilai Koefisien Pajak Daerah adalah 54,775 dengan arah positif (searah). Hal ini menunjukkan bahwa jika nilai pajak daerah naik, maka nilai produk domestik regional bruto juga akan naik. Sebaliknya jika nilai pajak daerah turun, maka nilai produk domestik regional bruto juga akan mengalami penurunan. Kenaikan atau penurunan tersebut sebesar 54,775.

Nilai Koefisien Retribusi Daerah adalah 228,446 dengan arah positif (searah). Hal ini menunjukkan bahwa jika nilai retribusi daerah naik, maka nilai produk domestik regional bruto juga akan naik. Sebaliknya jika nilai retribusi daerah turun, maka nilai produk domestik regional bruto juga akan mengalami penurunan. Kenaikan atau penurunan tersebut sebesar 228,446.

Nilai Koefisien Investasi adalah -8,631 dengan arah negatif (berlawanan). Hal ini menunjukkan bahwa jika nilai investasi naik, maka nilai produk domestik regional bruto juga akan naik. Sebaliknya jika nilai investasi turun, maka nilai produk domestik regional bruto juga akan mengalami penurunan. Kenaikan atau penurunan tersebut sebesar -8,631.

Tabel 13. Hasil Uji Regresi Linier Persamaan 2

Model	Coeff.	t	Sig
(Constant)	1,437E+12	5,826	,000
Pajak Daerah	75,043	0,880	,000
Retribusi Daerah	-334,346	-0,341	,016
Investasi	-1,880	-0,021	,870
Belanja Modal	-9,326	-0,112	,139
Pajak Daerah *Belanja Modal	-7,856E-11	-0,771	,008
Retribusi Daerah *Belanja Modal	1,485E-9	1,185	,000
Investasi *Belanja Modal	-1,384E-11	-0,090	,615

Sumber: Hasil Analisis Data, 2024

Persamaan 2 :

$$\text{PDRB} = 1,437\text{E}+13 + 75,043\text{PD} + -334,346\text{RD} + -1,880\text{I} + -9,326\text{BM} + -7,856\text{E}-11\text{PD}*\text{BM} + 1,485\text{E}-9\text{RD}*\text{BM} + -1,384\text{E}-11\text{I}*\text{BM} + e$$

Berdasarkan model regresi linier yaitu uji Moderated Refresion Analysis yang dijelaskan pada persamaan 2 pada tabel IV.12 ini dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

Koefisien regresi Belanja Modal dalam mempengaruhi hubungan Pajak Daerah dengan Produk Domestik Regional Bruto mengarah ke nilai negatif sebesar $-7.856\text{E}-11$. Hal ini menunjukkan setiap kenaikan dari Belanja Modal akan menurunkan hubungan Pajak Daerah. Sebaliknya, setiap penurunan Belanja Modal maka akan menaikkan hubungan Pajak Daerah. Kenaikan atau penurunan tersebut sebesar $-7.856\text{E}-11$.

Koefisien regresi Belanja Modal dalam mempengaruhi hubungan Retribusi Daerah dengan Produk Domestik Regional Bruto mengarah ke nilai positif sebesar $1485\text{E}-9$. Hal ini menunjukkan setiap kenaikan dari Belanja Modal akan diikuti dengan kenaikan hubungan Retribusi Daerah. Sebaliknya, setiap penurunan Belanja Modal juga akan menurunkan hubungan Retribusi Daerah. Kenaikan atau penurunan tersebut sebesar $1485\text{E}-9$.

Koefisien regresi Belanja Modal dalam mempengaruhi hubungan Investasi dengan Produk Domestik Regional Bruto mengarah ke nilai negative sebesar $-1.384\text{E}-11$. Hal ini menunjukkan setiap kenaikan dari Belanja Modal akan menurunkan hubungan Investasi. Sebaliknya, setiap penurunan Belanja Modal maka akan menaikkan hubungan Investasi. Kenaikan atau penurunan tersebut sebesar $-1.384\text{E}-11$.

Tabel 14. Hasil Uji F Persamaan 1

Model	F	Sig.
-------	---	------

Regression	0.281	0,000 ^b
Reidual		
Total		

Sumber: Hasil Analisis Data, 2024

Tabel 15. Hasil Uji F Persamaan 2

Model	F	Sig.
Regression	50.776	0,000 ^b
Reidual		
Total		

Sumber: Hasil Analisis Data, 2024

Berdasarkan Tabel 14 dan 15, hasil uji simultan F menunjukkan besar nilai signifikansi 0,000. Nilai signifikansi yang dihasilkan uji F lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi berganda sudah memenuhi syarat dan dapat dikatakan *fit model regression*.

Tabel 16. Hasil Uji R² Persamaan 1

Model	R	R Square	Adj R Square	Std. Error fthe Estimate
1	0.782 ^a	0,611	0,605	9,522E+12

Sumber: Hasil Analisis Data, 2024

Tabel 17. Hasil Uji R² Persamaan 2

Model	R	R Square	Adj R Square	Std. Error fthe Estimate
1	0.812 ^a	0,660	0,647	8,997E+12

Sumber: Hasil Analisis Data, 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* pada persamaan 1 sebesar 0,605 atau 60,5%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel independennya yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Investasi dapat menjelaskan variasi variabel dependen yaitu Produk Domestik Regional Bruto sebesar 0,605 atau 60,5% sedangkan sisanya adalah sebesar 39,5% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini. Sedangkan R² pada saat uji *moderated refresion analysis* nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,647 atau 64,7% Hal ini menunjukkan bahwa variasi variabel Produk Domestik

Regional Bruto dapat dijelaskan oleh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Investasi dan pemoderasi.

Tabel 18. Hasil Uji t

Var	p	T _{hitung}	T _{tabel}	Sig	Keternagan
PD	0,05	9,379	1.652	0,000	H ₁ Diterima
RD	0,05	3.515	1.652	0,001	H ₂ Diterima
I	0,05	-1.852	1.652	0,666	H ₃ Ditolak
PD*B M	0,05	-2.696	1.652	0,008	H ₄ Diterima
RD*B M	0,05	4.454	1.652	0,000	H ₅ Diterima
I*BM	0,05	-0.090	1.652	0,615	H ₆ Ditolak

Sumber: Hasil Analisis Data, 2024

Berdasarkan table IV. 17 dan IV. 18 diperoleh hasil sebagai berikut:

Pajak Daerah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05 atau 5%. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H₁ diterima.

Retribusi Daerah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001 yang berarti lebih kecil dari 0,05 atau 5%. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H₂ diterima.

Investasi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,066 yang berarti lebih besar dari 0,05 atau 5%. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel Investasi berpengaruh signifikan negatif terhadap Produk Domestik Regional Bruto. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H₃ ditolak.

Pajak Daerah dan Belanja Modal memiliki nilai signifikansi sebesar 0,008 yang berarti lebih kecil dari 0,05 atau 5%. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel Belanja Modal dapat memoderasi hubungan antara Pajak Daerah dengan Produk Domestik

Regional Bruto. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H₄ diterima.

Retribusi Daerah dan Belanja Modal memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05 atau 5%. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel Belanja Modal dapat memoderasi hubungan antara Retribusi Daerah dengan Produk Domestik Regional Bruto. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H₅ diterima.

Investasi dan Belanja Modal memiliki nilai signifikansi sebesar 0,615 yang berarti lebih besar dari 0,05 atau 5%. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial Belanja Modal tidak dapat memoderasi hubungan antara Investasi dengan Produk Domestik Regional Bruto. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H₆ ditolak.

Pembahasan Penelitian

Pajak Daerah berpengaruh terhadap Produk DOMestik Regional Bruto

Variabel Pajak Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dengan nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Nilai t hitung 9,379 juga lebih besar dari t tabel 1,652. Dengan demikian, hipotesis H₁ diterima. Pajak daerah dianggap sebagai faktor produksi, khususnya dalam akumulasi modal. Penerimaan pajak daerah yang meningkat dapat meningkatkan output berupa barang dan jasa yang dihasilkan PDRB, karena pajak daerah tersebut merupakan modal untuk melakukan kegiatan produksi. Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Hani Puspitasari, Mohammad Khusaini, dan Farah Wulandari Pangestuty (2023), serta Dwika Julia Mutiara (2015).

Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto

Retribusi Daerah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001 yang berarti lebih kecil dari 0,05 atau 5% dan nilai t_{hitung} 3,515 lebih besar dibandingkan dengan t_{tabel} 1,652. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_2 diterima. Retribusi daerah dan PDRB memiliki hubungan yang erat dalam konteks ekonomi suatu wilayah. Retribusi daerah adalah pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari pungutan atas pelayanan atau fasilitas yang diberikan kepada masyarakat atau perusahaan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwika Julia Mutiara (2015).

Investasi berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto

Hasil analisis menunjukkan bahwa investasi tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), karena nilai signifikansi 0,066 lebih besar dari 0,05. Nilai t hitung -1,852 juga lebih kecil dari t tabel 1,652. Dengan demikian, hipotesis H_3 ditolak. Penelitian ini sejalan dengan temuan sebelumnya oleh Zulaili, Indra Maipita, dan Muhammad Fitri Rahmadana (2020), yang mengartikan investasi sebagai penanaman dana dengan harapan mendapat hasil dan nilai tambah. Konsep investasi juga diperkuat oleh pandangan Sutha (2000), Webster (1999), dan Lypsey (1997), yang menyoroti peningkatan nilai atau return positif dari penanaman dana, serta pembagian investasi berdasarkan periode waktunya menjadi jangka pendek, menengah, dan panjang.

Pajak Daerah berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto

dengan Belanja Modal sebagai Pemoderasi

Hasil analisis menunjukkan bahwa Belanja Modal memperlemah hubungan antara Pajak Daerah dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dengan nilai signifikansi 0,008 yang lebih kecil dari 0,05. Nilai t hitung -2,696 juga lebih kecil dari t tabel 1,652. Dengan demikian, hipotesis H_4 diterima, menandakan bahwa Belanja Modal berperan sebagai pure moderating dalam memoderasi hubungan antara Pajak Daerah dan PDRB. Pajak Daerah, yang merupakan kontribusi wajib kepada daerah, digunakan untuk keperluan daerah demi kemakmuran rakyat.

Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto dengan Belanja Modal sebagai Pemoderasi

Hasil analisis menunjukkan bahwa Belanja Modal berperan sebagai pure moderating yang memoderasi hubungan antara Retribusi Daerah dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Hal ini didukung oleh nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, serta nilai t hitung sebesar 4,454 yang lebih besar dari t tabel 1,652. Dengan demikian, hipotesis H_5 diterima. Retribusi daerah menjadi salah satu sumber pendanaan utama untuk belanja modal, dan pengelolaannya yang bijak dan transparan dapat menciptakan siklus positif yang berkontribusi pada pembangunan wilayah, peningkatan daya saing ekonomi, serta penguatan kontribusi terhadap PDRB.

Investasi berpengaruh terhadap Produk DOMestik Regional Bruto dengan Belanja Modal sebagai Pemoderasi

Hasil analisis menunjukkan bahwa Belanja Modal tidak dapat memoderasi hubungan antara Investasi dan Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB), dengan nilai signifikansi 0,615 yang lebih besar dari 0,05. Nilai t hitung -504 juga lebih kecil dari t tabel 1,652. Dengan demikian, hipotesis H6 ditolak. Belanja Modal hanya berperan sebagai homologiser moderating. Investasi, menurut Sumanto (2006), merupakan komitmen dana untuk mendapatkan pendapatan di masa yang akan datang, sementara Husnan dalam Anoraga dan Pakarti (2006) mendefinisikan investasi sebagai penggunaan uang dengan maksud memperoleh penghasilan.

PENUTUP

Simpulan

Hasil penelitian pada kabupaten/kota di Pulau Jawa selama 2018-2020 menunjukkan bahwa secara keseluruhan, Pajak Daerah (PD), Retribusi Daerah (RD), dan Investasi (I) berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan nilai signifikansi $< 0,05$. Secara spesifik, PD dan RD berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB, sementara I tidak signifikan. Belanja Modal (BM) memoderasi hubungan PD dan RD dengan PDRB, namun tidak mempengaruhi hubungan I dengan PDRB, menegaskan pentingnya kebijakan belanja modal dalam memperkuat peran pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Keterbatasan dan Saran

Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokus hanya pada Kabupaten/Kota di Pulau Jawa selama tiga tahun (2018-2020), dengan hanya sekitar 60,5% variasi PDRB yang dapat dijelaskan oleh variabel independen yang diteliti. Rekomendasi penelitian mendukung perluasan wilayah studi dan penambahan variabel independen untuk analisis yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- aghniya, a. (2016). *pendapatan asal daerah (pad), belanja modal, pdrb harga berlaku. x*, 1–11.
- darma, d. c. (2020). determinants of the gross regional domestic product of east kalimantan province: macroeconomic variable review. *review of integrative business and economics research, february*. <http://buscompress.com/journal-home.html>
- fatmawati, k. (2022). gross domestic product: financing & investment activities and state expenditures. *kinerja: jurnal manajemen organisasi dan industri, 1(1)*, 11–18. <https://doi.org/10.37481/jmoi.v1i1.3>
- feriyanto, n. (2014). determinant of gross regional domestic product (grdp) in yogyakarta special province. *economic journal of emerging markets, 6(2)*, 131–140. <https://doi.org/10.20885/ejem.vol6.iss2.art6>
- hakim, h., abdullah, m. f., & boedirochminarni, a. (2019). pengaruh belanja modal, tenaga kerja dan pad terhadap pdrb provinsi jawa tengah. *jurnal ilmu ekonomi (jie), 3(4)*, 621–634.
- hidayat, w. s., & santosa, b. (2020). faktor – faktor yang mempengaruhi pdrb kabupaten dan kota di provinsi jawa barat 2010 – 2015. *jurnal penelitian dan karya ilmiah lembaga penelitian universitas trisakti, 5(1)*, 25–30. <https://doi.org/10.25105/pdk.v5i1.6421>
- hidayati, n. (2016). analisis pengaruh pad, dau dan dak terhadap alokasi belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi pada pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi

- jawa tengah. *skripsi. universitas muhammadiyah surakarta*.
- indra tama, a. (2016). pengaruh realisasi pendapatan pajak daerah dan pendapatan retribusi terhadap tingkat pengangguran dengan dimoderasi oleh belanja modal. *jrak: jurnal riset akuntansi & komputerisasi akuntansi*, 7(01), 1–10.
[http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1381738&val=1233&title=pengaruh realisasi pendapatan pajak daerah dan pendapatan retribusi terhadap tingkat pengangguran dengan dimoderasi oleh belanja modal](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1381738&val=1233&title=pengaruh%20realisasi%20pendapatan%20pajak%20daerah%20dan%20pendapatan%20retribusi%20terhadap%20tingkat%20pengangguran%20dengan%20dimoderasi%20oleh%20belanja%20modal)
- iskandar yahya arulampalam kunaraj p.chelvanathan, a. a. a. b. (2023). analisis pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, belanja daerah, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap pendapatan asli daerah kabupaten gresik. *journal of engineering research*.
- jaeni, & anggana l, g. (2016). pertumbuhan ekonomi sebagai variabel pemoderasi pendapatan asli daerah dan bantuan propinsi terhadap belanja modal. *dinamika akuntansi, keuangan dan perbankan*, 5(1), 13–26.
- kresnandra, a. a. n. a., made, & erawati, a. (2013). pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap tingkat pengangguran dengan belanja modal sebagai variabel pemoderasi. *akuntansi universitas udayana*, 3, 544–560.
- kusuma, s. g., & wahyudi, m. s. (2022). analisis pengaruh investasi, pajak daerah, tenaga kerja terhadap produk domestik regional bruto kabupaten/kota provinsi jawa timur tahun (2015-2019). *jurnal ilmu ekonomi jie*, 5(4), 773–783.
<https://doi.org/10.22219/jie.v5i04.18800>
- maria, s. (2023). the effect of population, gross regional domestic product and inflation on local tax revenues in dki jakarta province. *journal of international conference proceedings*, 6(1), 232–241.
<https://doi.org/10.32535/jicp.v6i1.2255>
- mokoginta, a., engka, d., & maramis, m. (2023). analisis pengaruh belanja modal, dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi di kota kotamubagu. *jurnal pembangunan ekonomi dan keuangan daerah*, 24(3), 284–303.
- mutiara, d. j. (2015). pajak daerah dan pengaruhnya terhadap pdrb di propinsi kalimanta timur. *signifikan: jurnal ilmu ekonomi*, 4(1).
<https://doi.org/10.15408/sjie.v4i1.2296>
- nugraha, i. p. b. i. m., & dwirandra, a. a. n. b. (2016). kemampuan pertumbuhan ekonomi memoderasi pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dau dan dbh pada belanja modal. *e-jurnal akuntansi universitas udayana*, 14(1), 284–311.
- puspitasari, h. (2023). analisis pendapatan daerah terhadap produk domestik regional bruto melalui belanja modal kawasan gerbangkertosusila. *indonesian treasury review jurnal perbendaharaan keuangan negara dan kebijakan publik*, 8(2), 171–187.
<https://doi.org/10.33105/itrev.v8i2.487>
- rini, w. s., ruwanti, g., & ernawati, s. (2018). capital expenditure determinants with economic growth as a moderator in regency and municipal government in south kalimantan. *international*

- journal of accounting, finance, and economics*, 71, 1–11.
- suryatiningrum, i., indarti, i., & adnanti, w. a. (2020). pengaruh pendapatan asli daerah (pad), dana alokasi umum (dau), dan dana alokasi khusus (dak) terhadap belanja modal dengan pendapatan per kapita sebagai variabel pemoderasi. *jurnal ilmiah aset*, 22(2), 131–146. <https://doi.org/10.37470/1.22.2.168>
- susetyo, d., zunaidah, ., yulianita, a., & lestari, w. (2019). *effect of capital expenditure, investments and human development index to gross regional domestic product provinces in sumatra-indonesia. seabc 2018*, 402–412. <https://doi.org/10.5220/0008440704020412>
- wijaya, t. s., ahmad, a. a., & arifin, a. (2023). the effect analysis of fiscal decentralization on gross regional domestic product per capita through regional expenditures kuningan in 2004 - 2020 tatang. *midyear international conference*, 259–270.
- yahya, e., olilingo, f. z., & ivan rahmat santoso. (2022). the effect of investment and exports on gross regional domestic product (grdp) in gorontalo province. *europaean journal of research development and sustainability*, 3(1), 1–4. <https://www.scholarzest.com>
- zuhroh, h. (2018). analisis pengaruh aset daerah dan belanja modal terhadap produk domestik regional bruto di koridor utara selatan provinsi jawa timur. *jurnal ilmu ekonomi*, 2, 241–250.
- zulaili, ., maipita, i., & rahmadana, m. f. (2020). *analysis of influence of population, investment and inflation on regional taxes with gross regional domestic products as an intervening variable: case study districts and cities in north sumatra province. unicees 2018*, 586–593. <https://doi.org/10.5220/0009508005860593>